

**Penguatan Tata Kelola Manajerial Badan Usaha Milik Desa Melalui
Pendampingan Partisipatif Di Desa Mataindaha**

***Strengthening The Managerial Governance Of Village-Owned Enterprises
Through Participatory Assistance In Mataindaha Village.***

Wa Ode Sartika¹, Muhammad Suriyadarman Rianse¹,

¹Universitas Karya Persada Muna

Jl. Gambas Kel.Sidodadi Kec. Batalaiworu Kab. Muna 93613

E-mail Korespondensi: waodesartika.ukpm@gmail.com

ABSTRACT

Village-Owned Enterprises (BUMDes) play a strategic role in strengthening the rural economy, yet many face managerial and organizational challenges that hinder optimal performance. This community service activity aimed to strengthen the managerial and organizational governance of BUMDes in Mataindaha Village, Pasikolaga District, Muna Regency. The activity employed a participatory assistance approach using observation, interviews, focus group discussions, managerial training, and on-site technical mentoring. The results indicate significant improvements in organizational structure aligned with existing regulations, clearer roles and responsibilities of management, the establishment of standard operating procedures, and enhanced managerial capacity in business planning and basic financial management. In addition, key institutional documents such as bylaws, annual work plans, and simple financial reporting formats were successfully developed. Despite these achievements, challenges remain in human resource capacity and optimization of business units. Overall, participatory assistance proved effective in strengthening BUMDes governance and can serve as a practical model for sustainable rural economic empowerment.

Keywords: BUMDes; participatory assistance; managerial governance; rural economy; community empowerment.

ABSTRAK

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) memainkan peran penting dalam meningkatkan ekonomi desa, tetapi dalam penerapannya masih banyak menghadapi hambatan dalam bidang manajemen dan organisasi. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan untuk meningkatkan pengelolaan manajemen dan struktur organisasi BUMDes Desa Mataindaha, Kecamatan Pasikolaga, Kabupaten Muna. Cara pelaksanaannya menggunakan pendekatan bantuan yang melibatkan partisipasi masyarakat melalui observasi, wawancara, diskusi kelompok fokus, pelatihan manajemen, serta bantuan teknis di lapangan. Hasil kegiatan menunjukkan adanya peningkatan struktur organisasi yang sesuai dengan aturan, kejelasan tugas pokok dan fungsi pengurus, adanya standar prosedur operasional, serta peningkatan kemampuan pengurus dalam perencanaan usaha dan pengelolaan keuangan yang sederhana. Selain itu, kegiatan tersebut juga menghasilkan dokumen penting seperti Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART), rencana kerja tahunan, serta format laporan keuangan sederhana. Meski demikian, keterbatasan tenaga manusia dan pengembangan unit usaha masih menjadi tantangan. Secara umum, pendampingan partisipatif terbukti efektif dalam meningkatkan pengelolaan BUMDes dan mendukung perkembangan ekonomi desa yang berkelanjutan.

Kata kunci: BUMDes; pendampingan partisipatif; tata kelola manajerial; pemberdayaan desa.

PENDAHULUAN

Pembangunan desa yang berkelanjutan memerlukan adanya lembaga ekonomi desa yang dikelola dengan baik, jujur, dan bisa dipertanggungjawabkan. Salah satu cara yang digunakan pemerintah untuk mendorong kemandirian ekonomi desa adalah dengan mendirikan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Pendirian lembaga ini merupakan mandat dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang diperkuat dengan tata kelola baru dalam Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021. BUMDes diharapkan dapat memanfaatkan potensi lokal desa dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui penguatan kapasitas manajerial yang profesional (Be et al., 2024). Transformasi BUMDes menjadi badan hukum kini menuntut pengelolaan yang lebih transparan dan akuntabel guna memastikan keberlanjutan ekonomi di tingkat tapak (Umar et al., 2023). Selain itu, optimalisasi BUMDes sebagai penggerak ekonomi kreatif berbasis potensi lokal menjadi kunci dalam menghadapi tantangan ekonomi global di masa depan (Rizal et al., 2024).

Namun, di lapangan terjadi bahwa banyak BUM Desa masih belum bisa bekerja dengan baik dan sering kali mengalami fenomena "mati suri" atau tidak aktif secara operasional (Umar et al., 2023). Beberapa masalah yang sering terjadi antara lain struktur organisasi yang lemah, tugas pengurus yang belum jelas, serta rendahnya inovasi dalam menangkap peluang pasar. Selain itu, kemampuan pengurus dalam mengelola usaha masih tergolong rendah, ditambah dengan sistem administrasi dan keuangan yang belum terorganisir dengan baik sehingga menghambat akuntabilitas lembaga (Be et al., 2024). Situasi ini juga dialami oleh BUM Desa Mataindaha, Kecamatan Pasikolaga, Kabupaten Muna, yang memiliki potensi ekonomi besar namun belum dimanfaatkan secara optimal. Kurangnya pemahaman manajerial dan belum adanya Standar Operasional Prosedur (SOP) yang jelas membuat unit usaha di desa ini sulit untuk berkembang secara profesional dan kompetitif (Rizal et al., 2024).

Pendampingan dalam hal manajemen dan organisasi menjadi salah satu solusi strategis untuk mengatasi berbagai permasalahan struktural di tingkat desa. Pendampingan ini tidak hanya sekadar memberikan informasi teknis, tetapi juga bertujuan membentuk kesadaran, komitmen, serta kapasitas pengurus BUM Desa dalam mengelola unit usaha secara profesional dan berkelanjutan (Be et al., 2024). Melalui pendampingan yang intensif, pengelola BUM Desa didorong untuk memiliki kemandirian manajerial yang kuat agar mampu menghadapi dinamika ekonomi lokal yang terus berubah (Umar et al., 2023). Pendekatan yang melibatkan kolaborasi multipihak, mulai dari pengurus BUM Desa, pemerintah desa, hingga masyarakat, dianggap sangat relevan karena menjamin partisipasi aktif dalam setiap tahapan pelaksanaan kegiatan (Rizal et al., 2024). Sinergi ini merupakan kunci utama dalam menciptakan tata kelola yang inklusif dan transparan, sehingga keberadaan BUM Desa benar-benar memberikan dampak nyata bagi peningkatan ekonomi komunitas lokal (Hafid.Abd et al, 2024).

METODE PELAKSANAAN

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini diadakan di Desa Mataindaha, Kecamatan Pasikolaga, Kabupaten Muna. Kegiatan ini dilaksanakan pada tahun 2025 dengan beberapa tahapan pendampingan yang disesuaikan dengan kondisi dan kesiapan mitra.

Mitra utama dalam kegiatan ini adalah pengurus Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Desa Mataindaha, yang terdiri dari ketua, sekretaris, bendahara, dan penanggung jawab unit usaha. Kegiatan juga melibatkan pemerintah desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), serta perwakilan masyarakat sebagai pemangku kepentingan.

Metode yang digunakan dalam kegiatan ini adalah pendampingan partisipatif. Tahapan yang dilakukan meliputi observasi kondisi BUMDes yang ada, wawancara dengan pengurus dan perangkat desa, diskusi kelompok terfokus, pelatihan dasar manajerial, pendampingan teknis di lapangan, serta penyusunan berbagai dokumen kelembagaan seperti struktur organisasi, SOP, AD/ART, dan rencana kerja.

Indikator keberhasilan kegiatan meliputi terbentuknya struktur organisasi BUMDes yang sesuai dengan regulasi, adanya pembagian tugas pokok dan fungsi yang jelas, tersusunnya SOP kerja, meningkatnya pemahaman pengurus tentang pengelolaan usaha dan keuangan sederhana, serta tersedianya dokumen kelembagaan yang mendukung.

Evaluasi kegiatan dilakukan secara deskriptif dengan melakukan pemantauan perubahan kondisi sebelum dan sesudah pendampingan, diskusi reflektif dengan pengurus BUMDes, serta penilaian terhadap pencapaian indikator keberhasilan yang telah ditetapkan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pendampingan dimulai dengan pengamatan langsung terhadap kondisi kelembagaan dan jalannya operasional BUMDes Desa Mataindaha. Dari hasil pengamatan terlihat bahwa struktur organisasi belum berjalan dengan baik dan belum didukung oleh sistem administrasi yang teratur. Selanjutnya dilakukan wawancara serta diskusi kelompok terfokus guna mengidentifikasi permasalahan yang ada dan potensi pengembangan usaha desa.

Hasil kegiatan menunjukkan adanya perbaikan pada struktur organisasi BUMDes yang sudah disesuaikan dengan peraturan yang berlaku. Setiap pengurus memiliki tugas dan fungsi yang jelas serta terdokumentasi secara tertulis. Selain itu, dibuatkan standar operasional prosedur untuk mendukung proses pencatatan keuangan, pengambilan keputusan usaha, serta pelaporan dan pertanggungjawaban.

Pendampingan juga meningkatkan kemampuan pengurus dalam manajemen melalui pelatihan perencanaan usaha, pengelolaan keuangan sederhana, serta komunikasi dan kepemimpinan organisasi. Dokumen kelembagaan seperti AD/ART, rencana kerja tahunan, dan format laporan keuangan sederhana sudah berhasil dibuat sebagai dasar dalam penguatan tata kelola BUMDes.

Meskipun hasil pendampingan menunjukkan perkembangan yang positif, masih ada kendala berupa keterbatasan sumber daya manusia di bidang akuntansi dan pelaporan, serta belum optimalnya seluruh unit usaha. Karena itu diperlukan pendampingan lanjutan dan dukungan berkelanjutan dari pemerintah desa dan pihak terkait.

KESIMPULAN

Kegiatan pendampingan manajerial dan organisasi BUMDes Desa Mataindaha berhasil memperkuat tata kelola kelembagaan dan meningkatkan kapasitas pengurus dalam mengelola usaha desa. Pendampingan partisipatif terbukti efektif sebagai pendekatan pengabdian kepada masyarakat dalam mendukung keberlanjutan ekonomi desa. Ke depan, diperlukan pelatihan lanjutan dan penguatan sumber daya manusia agar BUMDes mampu berkembang secara mandiri dan profesional.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis menyampaikan rasa terima kasih kepada Pemerintah Desa Mataindaha, pengurus BUMDes, BPD, serta Universitas Karya Persada Muna melalui LPPM atas bantuan dan dukungan yang telah diberikan dalam penyelenggaraan kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Be, E., Oki, K. K., & Babulu, N. L. (2024a). Penguatan Kapasitas dan Tata Kelola Keuangan BUMDes di Desa Oinbit Kecamatan Insana. *Kontribusi: Jurnal Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat*, 4(2), 206–215.
- Hafid, A., & Bahri, S. (2024). Penguatan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Untuk Pembangunan Berkelanjutan Di Kabupaten Bone Perspektif Maqashid Syariah. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 10(1),
- Prasetyo, A. S. (2021). Strategi transformasi digital BUM Desa dalam menghadapi era industri 4.0. *Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 2, 210–225.
- Republik Indonesia. (2014). *Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa*. Sekretariat Negara.
- Republik Indonesia. (2021). *Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa*. Sekretariat Negara.
- Rizal, R., M. F., N. I. A., A. I., & I. R. A. (2024). Pendampingan Pengembangan BUMDes Melalui Pendekatan Ekonomi Kreatif. *Community Development Journal: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 5, 8977–8983.
- Umar, N., A. A., & I. R. (2023). Pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Kecamatan Telaga Biru. *Sosiologi: Jurnal Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat*, 2, 39–48.